

Evaluasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Menjelang Akhir Masa Jabatan

¹Iwan Sumiarsa, Hidayat, Siti Nur Azijah, Yusup Supendi, Muhammad Husein Maruapey, Agus Suarman Sudarsa

¹Universitas Djuanda, Indonesia; hidayatfarhan99@gmail.com

Received: March 27, 2023; In Revised: May 02, 2023; Accepted: May 22, 2023

Abstract

In 2024 Joko Widodo will end his tenure as President with a series of polemics at the end of his tenure. He was considered not neutral in the presidential election contest because he openly stated that he would not be neutral for the sake of the nation and state. His statement immediately received responses from various groups because he considered that what Jokowi was doing was a step to secure various projects that are still experiencing problems, such as the National Capital project which is still hampered by development investment and the Jakarta-Bandung Fast Railroad project which is experiencing swelling. cost. President Jokowi's policies must certainly receive an evaluation so that in the future what has not been done by Jokowi can be followed up by the next President, especially employment and poverty problems which until now have not been optimally resolved. This research was conducted to assess President Jokowi's performance by analyzing various sources so that it can be found what Jokowi has achieved and what he has not done. Using a descriptive methodology, the author will describe the results of the author's analysis and observations from various sources of electronic media and journals that discuss President Jokowi's performance, for further comments.

Keywords: Evaluation, Leadership, Joko Widodo, President, Position.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan memiliki pemimpin baru karena di tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum. Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama dua periode sejak tahun 2014 dipastikan tidak bisa mencalonkan diri kembali karena konstitusi Indonesia hanya memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menjabat paling lama dua periode dengan masing-masing selama 5 (lima) tahun. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*". Dengan catatan semua element negara tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi yang hanya memberi masa jabatan maksimal 10 tahun bagi Presiden.

Selama kepemimpinannya, Joko Widodo sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Bahkan beberapa proyek pembangunan dimasanya banyak menyita perhatian khalayak ramai, seperti proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang dianggap proyek belum saatnya untuk dimiliki Indonesia. Atau proyek perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang membutuhkan biaya besar. Belum lagi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi dunia lumpuh, tidak terkecuali Indonesia. Akibatnya hutang Indonesia meningkat dibandingkan dengan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada akhir Maret 2023 hutang pemerintah mencapai Rp. 7.879 Triliun dengan rincian: SBN Domestik 5.658,77, SBN Valas 1.354, 81, Pinjaman Luar Negeri 844,17 dan Pinjaman Dalam Negeri mencapai 21,31. Walaupun demikian menurut Sri Mulyani rasio hutang terhadap PDB masih aman karena hanya 39,17 %, dibawah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur rasio hutang dengan PDB tidak boleh lebih dari 60% PDB (Annur, 2023).

Walaupun demikian beban negara terhadap utang era Susilo Bambang Yudhoyono meningkat pesat. Pada akhir kepemimpinan SBY, utang Indonesia mencapai Rp. 2.608 Triliun, sedangkan menjelang masajabatan Jokowi berakhir, dia meninggalkan utang negara sebesar Rp. 7.554 Triliun (<https://www.liputan6.com/>). Selain itu Joko Widodo dihadapkan pada stabilitas politik yang sempit memanas paska pemilu 2019 dan sederet janji politik yang belum terealisasi, termasuk isu pelemahan KPK dengan diubahnya Undang-Undang KPK. Kriminalisasi ulama yang dihadapi beberapa tokoh ulama yang keras mengkritisi pemerintah dan kondisi ekonomi yang dirasa semakin berat.

Menjelang berakhir masa jabatannya, Joko Widodo banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena terkesan menyiapkan penerus yang akan meneruskan kepemimpinannya. Menurut Prof. Deni Indrayana, apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Konstitusi. Dalam tulisannya yang berjudul “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo Dan Menolak Anies”, Prof. Deni Indrayana mengkritik keras cawe-cawe yang dilakukan Jokowi. Dia menganalisa bahwa dari gestur politik yang dilakukan oleh Jokowi, ada cara-cara yang mengarah pada tujuan untuk mengamankan Anies agar tidak berhasil melenggang menjadi Presiden.

Pertama, lingkaran Jokowi mendorong untuk menunda pemilihan dan memperpanjang masa jabatan presiden karena COVID-19 dan instabilitas ekonomi dunia; *Kedua*, ada upaya untuk mengubah konstitusi dengan mendorong agar Masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun upaya ini gagal karena ditolak oleh banyak Partai Politik yang sudah bersiap untuk melakukan Pemilu; *Ketiga*, menguasai KPK untuk memukul lawan politik; *Keempat*, menggunakan sengketa hukum sebagai alat tawar-menawar politik untuk mengarahkan partai politik ke arah yang diperlukan untuk membentuk koalisi untuk pemilihan presiden (Prasetyo 2018); *Kelima*, mencopot petinggi partai yang tidak sesuai dengan strategi dari jabatannya dipemerintahan; *Keenam*, mempersiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan sengketa pemilihan Presiden; *Ketujuh*, Jokowi mencadangkan Prabowo demi untuk menjegal Anies. Sebab dari hasil survei yang ada, suara Anies masih begitu dominan jika Anda harus melawan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto; *Kedelapan*, jegal Anies melalui dugaan tindak pidana korupsi pada Formula E. Pada awalnya hal ini sempat ramai diperbincangkan, bahkan ada isu bahwa tersingkirnya Endar Prianto dari gerbong KPK karena menolak untuk menjadikan Anies sebagai Tersangka kasus Formula E; *Kesembilan*, mengambil alih Demokrat dari tangan SBY untuk melemahkan koalisi Anies Baswedan; dan *Kesepuluh*, berbohong kepada publik bahwa Jokowi tidak berbuat cawe-cawe dalam Pilpres 2024 (Indrayana, 2023).

Dalam konteks Administrasi Publik, perlu kiranya untuk dianalisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari berbagai indikator penilaian. Hal ini agar menjadi gambaran bagi Presiden selanjutnya apa saja yang menjadi penghambat Jokowi dan kebijakan apa saja yang harus dievaluasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis framing Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, di mana wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. (Wulandari 2016)

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

Salah satu kebijakan pembangunan era Presiden Jokowi yang cukup menyita perhatian masyarakat banyak adalah pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung. Kebijakan ini dianggap tergesa-gesa karena unuk jarak tempuh Jakarta – Bandung relatif mudah untuk dilalui dengan bermacam moda transportasi yang ada. Ekonom senior, Emil Salim menilai bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan matang, padahal sudah dimulai sejak tahun 2014. Menteri BUMN yang ketika itu menjabat tidak berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan saat itu, padahal Menhub saat itu merupakan orang yang berhasil mengubah PT. KAI menjadi lebih baik, sehingga sudah pasti dia tahu betul permasalahan perkeretaan di Indonesia. Disinyalir membengkaknya biaya pembangunan dikarenakan kurang matangnya perencanaan.

Pemerintah Kembali menambah modal dasar pembangunan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 4,3 Triliun. Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya dari US\$ 1,3 – US\$ 1,6 miliar atau setara Rp. 18,3 triliun – Rp. 22,5 triliun (kurs Rp. 14.100/US\$) bahkan dikarenakan keterlambatan penanganan biaya proyek membengkak sampai US\$ 7,9 miliar atau Rp. 113,1 triliun (Rahadian, 2021).

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dalam upayanya untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Presiden Jokowi tidak mengambil risiko (Zhou, Yang, and Wang 2020). Hal-hal serius itu Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibukota Negara Nusantara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dapat dicermati. Bahkan ditengah pandemi Covid-19 proyek tersebut tetap berjalan, meski harus mengeluarkan dana yang besar. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk mencari investor yang bersedia untuk mengucurkan dananya dalam proyek IKN dengan janji akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta berbagai fasilitas yang menguntungkan dari mulai Keringanan pajak yang signifikan dalam bentuk pajak penghasilan yang lebih rendah, pembebasan bea masuk, dan keringanan pajak untuk kegiatan litbang (Safrina, Soehartono, and Savitri 2020). Teranyar pemerintah memberikan izin Hak Guna Usaha selama 190 tahun kepada pengusaha yang akan berusaha di IKN.

Ekonomi senior, Faisal Basri mengkritik kebijakan pemerintah untuk tetap membangun IKN ditengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor terganggu, termasuk ekonomi. Menurutnya skema pembiayaan IKN tidak jelas dan faktanya banyak yang meleset dari perencanaan. Pada awalnya IKN tidak akan membebani APBN, faktanya hingga 2024 pembangunan IKN sebesar 53,3 persen dibebankan pada APBN dan 46,7 persen dibebankan pada BUMN. Bahkan anggaran IKN menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang seharusnya dana tersebut diprioritaskan bagi pemulihan ekonomi rakyat yang terpuuk dengan Covid-19 (Mantalean, 2022).

Efektivitas Penanganan Covid-19

Dalam menangani Covid-19 Jokowi dianggap kurang begitu berhasil dengan beberapa pencapaian sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan tidak begitu berhasil karena korban meninggal dan penyaluran bantuan social yang mengalami permasalahan.

- b. Masyarakat kurang menanggapi himbuan pemerintah karena pemerintah gagal menyampaikan kepada masyarakat terkait Covid-19 sehingga masyarakat menilai bahwa Pandemi ini hanya konspirasi internasional.
- c. Masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena Pandemi Covid-19 (Firdausi, 2021).

Evaluasi

Apa yang dilakukan oleh Jokowi menjelang pemilu 2024 menuai banyak kritik, apa lagi pernyataannya terkait cawe-cawe politik demi kepentingan bangsa (Setyarso, 2023). Banyak orang mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan strategi untuk mengamankan proyek-proyek yang sampai saat ini belum selesai. Dia ingin meninggalkan *legacy* sebagai Presiden dengan pembangunan yang masif. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai bahwa cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi sangatlah tidak elok. Apa yang dilakukannya dapat saja dilakukan *impeachment* (pelengseran) berdasarkan pada Pasal 7A UUD 1945, namun hal tersebut sangat kecil kemungkinan terjadi (Farahdina, 2023).

Ditengah upaya masyarakat memulihkan perekonomian mereka, seharusnya pemerintah fokus untuk membuka investasi yang menyerap banyak tenaga kerja atau membuka seluas-luasnya daya saing masyarakat sehingga mampu melakukan produksi untuk meningkatkan perekonomiannya. Belum lagi besarnya angka PHK menyebabkan angka pengangguran meningkat. Selain itu kompensasi dari PHK yang berkurang imbas dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan banyak masyarakat harus memutar otak untuk bertahan hidup. Teranyar GoTo dan Shoope mengkonfirmasi telah mem-PHK karyawannya.

Kesimpulan

Evaluasi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung adalah kebijakan pembangunan era Presiden Jokowi yang cukup menyita perhatian masyarakat banyak. Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya dari US\$ 1,3 - US\$ 1,6 miliar atau setara Rp. 18,3 triliun - Rp. 22,5 triliun (kurs Rp. 14.100/US\$). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kebijakan pembangunan era Presiden Jokowi yang cukup menyita perhatian masyarakat banyak. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah Jokowi dianggap kurang begitu berhasil dengan beberapa pencapaian sebagai berikut: a) pencapaian tujuan tidak begitu berhasil karena korban meninggal dan penyaluran bantuan social yang mengalami permasalahan; b) masyarakat kurang menanggapi himbuan pemerintah karena pemerintah gagal menyampaikan kepada masyarakat terkait Covid-19; c) masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena Pandemi Covid-19.

Referensi

- Afriyansah, A. (2015). Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id>.
- Agustinus Lejiu, D. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). <https://e-journals.unmul.ac.id>.

- Annur, C. M. (2023). Komposisi Hutang Pemerintah Indonesia (31 Maret 2023). <https://databoks.katadata.co.id/>.
- Dr. Nashudin, M. (2016). *Manajemen & Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Sanabil.
- Dr. Wendy Sepmady Hutahaen, S. M. (2021). *Fisafat dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahli Media Press.
- Erick Hidayatulloh Armanto, D. (2010). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program One Village one Product Di Kabupaten Pasuruan). <https://pemerintahan.umm.ac.id/>.
- Farahdina, G. (2023, Mei Selasa). Pernyataan Jokowi Akan Cawe-Cawe Di Pemilu 2024 Dinilai Kurang Elok. <https://video.medcom.id/medcom-nasional/akWXm03K-pernyataan-jokowi-akan-cawe-cawe-di-pemilu-2024-dinilai-kurang-elok>.
- Firdausi, B. M. (2021). Menakar Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Ditengah Wabah Pandemi Covid-19. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/7824/4648>.
- Ghazali, A. H. (1988). *Al Tibr Al Masbuk Fi Nasihat Al Muluk*. Bairut: Dar Al Kutu Al Ilmiah.
- Indrayana, P. D. (2023). Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo Dan Menolak Anies. <https://integritylawfirms.com/indonesia/category/artikel/>.
- Lejiu, A., & Irawan, B. (2017). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515-526.
- Mantalean, V. (2022, Januari). Kritik Faisal Basri Soal Proyek IKN Yang Bebani APBN Hingga Peluang Jadi Skandal. 23.
- Prasetio, A. (2018). *Model Oposisi Partai Politik di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS Terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla Pada Tahun 2014-2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Rahadian, L. (2021, 28 Desember). Emil Salim Kritik Proyek Kereta Cepat JKT-BDG: SAYA KECEWA! *CNBC Indonesia*
- Ridho, A. J. (2020). *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1-11.
- Setyarso, B. (2023, Mei Senin). Presiden Jokowi Akui Tidak Akan Netral Pada Pilpres 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1731263/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024>.

Silitonga, D. (2018). Evaluasi Out Come Kebijakan UN SD Di Kota Madya Djakarta Pusat .
<https://ibn.e-journal.id>.

Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies (2nd ed.).
Prentice Hall.

Wulandari, T. D. (2016). Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Menurut Kacamata 5 Media
Massa di Indonesia. *Jurnal Aspikom*, 3(1), 88-103.